

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA DI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

One Agus Sukarno

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerjasama

* Email korespondensi: one@bsn.go.id

Submit : 17 Februari 2026, Review : 30 Meret 2026, Publish : 13 April 2026

ABSTRACT

Budget absorption is an important indicator in assessing the effectiveness of fiscal policy implementation and the quality of state financial management. An optimal absorption rate reflects the ability of government institutions to implement programs and activities according to established plans. This study aims to analyze the influence of personnel expenditures, goods expenditures, and capital expenditures on the level of budget absorption at the National Standardization Agency. The study uses a quantitative approach with secondary data sourced from budget realization reports and official the National Standardization Agency financial documents. The analysis technique used was multiple linear regression, with a classical assumption test first conducted to ensure model feasibility. The results show that personnel expenditures have a significant effect on budget absorption, while goods expenditures and capital expenditures do not have a significant effect on budget absorption at the National Standardization Agency. However, simultaneously, the variables of personnel expenditures, goods expenditures, and capital expenditures influence budget absorption.

Keywords: *Budget absorption (;) personnel expenditures (;) goods purchase (;) capital expenditure*

ABSTRAK

Penyerapan anggaran merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Tingkat penyerapan yang optimal mencerminkan kemampuan lembaga pemerintah dalam merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap tingkat penyerapan anggaran di Badan Standardisasi Nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran dan dokumen keuangan resmi Badan Standardisasi Nasional. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan belanja barang dan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran Badan Standardisasi Nasional. Namun, secara simultan variabel belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Kata Kunci: Penyerapan anggaran (;) belanja pegawai (;) belanja barang (;) belanja modal



PENDAHULUAN

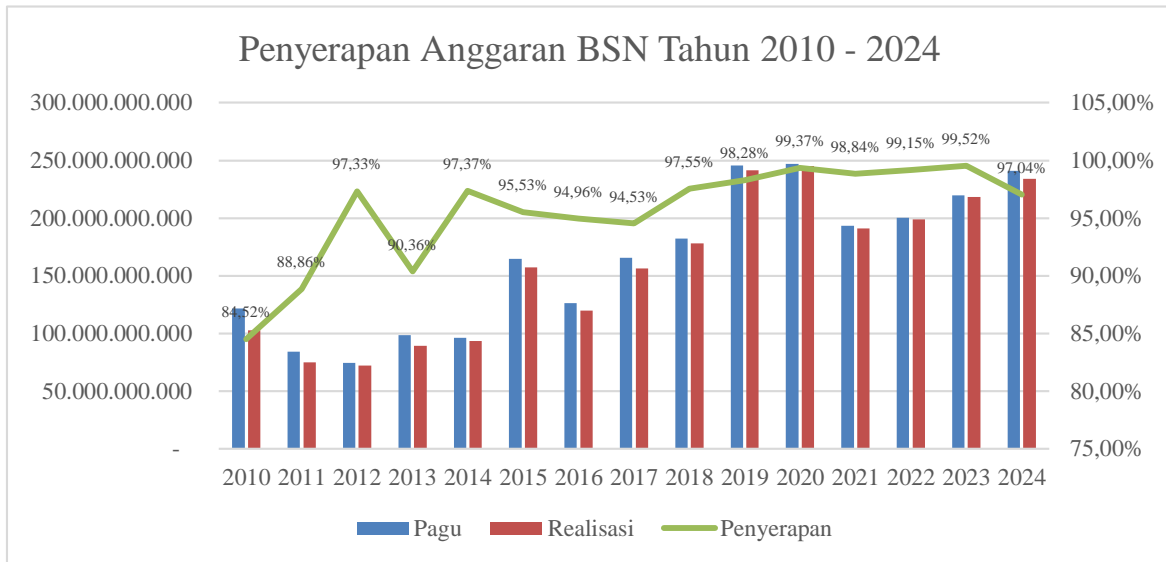
Penyerapan anggaran mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Tingkat penyerapan yang tinggi menunjukkan keberhasilan realisasi stimulus pemerintah, sedangkan penyerapan yang rendah menandakan adanya kendala perencanaan dan pelaksanaan yang menghambat pencapaian output program (Ngongo dan Rahyuda, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip nilai uang (*value for money*), yang menekankan bahwa alokasi anggaran harus menghasilkan *output* secara efisien dan efektif (Kuntadi dan Nugroho, 2023). Penyerapan tahunan yang tidak maksimal akan mengganggu fungsi distribusi dan stabilisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi (Halim dan Kusufi, 2020). Dengan demikian, perencanaan anggaran yang baik sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penyerapan.

Pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai penggerak perekonomian melalui penyediaan infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan sektor unggulan. Kapasitas birokrasi dalam merencanakan dan mengeksekusi kebijakan sangat menentukan tingkat penyerapan anggaran suatu negara. Pada program berbasis kinerja, efektivitas penyerapan anggaran menjadi syarat utama agar dana publik termanfaatkan secara optimal (Ananda *et al.*, 2022). Penyerapan yang optimal mampu meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas belanja pemerintah, sementara serapan yang rendah mengindikasikan adanya inefisiensi birokrasi (World Bank 2020). Permasalahan inefisiensi ini menegaskan perlunya pengawasan terhadap penyerapan anggaran, khususnya di negara berkembang dengan sistem birokrasi yang panjang seperti Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 yang menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan realisasi anggaran. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 1,3 triliun US\$ pada 2024, Indonesia menempati peringkat ke-16 ekonomi terbesar di dunia dan memiliki kapasitas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (World Bank 2025). Di Indonesia, pengelolaan anggaran negara menuntut adanya evaluasi pada tingkat kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama kebijakan fiskal. Namun, setiap lembaga pemerintah memiliki karakteristik tugas, fungsi, serta struktur belanja yang berbeda yang dapat menimbulkan perbedaan tingkat dan pola penyerapan anggaran. Salah satu institusi dengan peran dalam struktur pembangunan tersebut adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN).

BSN bertugas merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar nasional untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa serta melindungi kepentingan publik. Peran ini menempatkan BSN sebagai institusi yang berkontribusi langsung terhadap kebijakan industri, perdagangan, dan inovasi nasional (BSN 2022). Sebagai lembaga yang didanai melalui APBN, BSN mengelola anggaran untuk menjalankan fungsi standarisasi, penguatan infrastruktur mutu, serta layanan teknis dan administratif. Dalam kerangka pengelolaan fiskal jangka menengah, penyerapan anggaran di BSN perlu dikaji karena mencerminkan kapasitas lembaga dalam mengelola sumber daya publik secara berkelanjutan. Evaluasi ini juga sejalan dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas dan kualitas belanja pemerintah dalam agenda reformasi keuangan negara (Kementerian Keuangan RI 2023). Dengan demikian, perlu diketahui lebih dalam sistematisasi dan faktor pembentuk dari penyerapan anggaran di BSN.





Gambar 1. Grafik Penyerapan Anggaran BSN Tahun 2010 - 2024

Gambar 1 menunjukkan pagu anggaran BSN meningkat dari Rp121,6 miliar menjadi Rp241,1 miliar, diikuti kenaikan realisasi dari Rp102,8 miliar menjadi Rp233,9 miliar. Tingkat penyerapan pada periode awal masih fluktuatif dan relatif rendah, yaitu 84,52 persen pada 2010 dan 88,86 persen pada 2011, kemudian membaik dengan capaian di atas 97 persen pada beberapa tahun seperti 2012 dan 2014, namun kembali turun pada 2013 dan 2017. Periode 2018–2023 menunjukkan kinerja yang lebih stabil dengan penyerapan konsisten di atas 97 persen dan mencapai 99,52 persen pada 2023. Pada 2024, meskipun pagu meningkat, penyerapan menurun menjadi 97,04 persen.

Realisasi anggaran mencerminkan tingkat penyerapan yang dicapai suatu instansi dalam satu periode fiskal. Realisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran, kapasitas organisasi, tata kelola pelaksanaan kegiatan, hingga struktur alokasi anggaran. Realisasi merupakan hasil dari seluruh siklus anggaran yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Hadisutisna, 2025). Selain faktor administratif dan kelembagaan, komposisi belanja juga berperan karena setiap jenis belanja memiliki karakter pelaksanaan yang berbeda (World Bank 2022). Alokasi yang selaras dengan kebutuhan, kapasitas, dan tujuan strategis lebih mudah direalisasikan dibandingkan alokasi yang tidak sesuai dengan kondisi operasional (Kuntadi dan Nugroho, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbedaan dalam komposisi belanja dapat menghasilkan perbedaan dalam tingkat realisasi anggaran, meskipun berada dalam kerangka regulasi yang sama (Fitri *et al.*, 2022; Rahmawati dan Ishak, 2020). Dengan begitu, belanja dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Salah satu jenis belanja adalah belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan komponen belanja pemerintah yang bersifat wajib dan memiliki tingkat kepastian realisasi tinggi karena terkait pembayaran gaji, tunjangan, serta kewajiban kepegawaian. Teori *expenditure rigidity* menjelaskan bahwa belanja rutin yang tidak elastis terhadap perubahan kebijakan jangka pendek lebih mudah direalisasikan dibandingkan belanja berbasis proyek atau pengadaan (Harris, 2025). Suciati (2025) menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai yang lebih besar meningkatkan realisasi karena mekanisme pencairannya sederhana dan terjadwal sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).



Suryono (2020) juga menemukan bahwa belanja pegawai menjaga stabilitas penyerapan pada instansi dengan fungsi administratif dan teknis yang padat sumber daya manusia. Namun, Fitriani dan Mulyandani (2025) mencatat bahwa besarnya belanja pegawai tidak selalu meningkatkan penyerapan tanpa perencanaan kebutuhan dan distribusi beban kerja yang tepat terutama terkait rekrutmen dan penyesuaian gaji. Hadisutisna (2025) menambahkan bahwa dominasi belanja pegawai dapat mengurangi fleksibilitas fiskal dan membatasi realisasi belanja lain sehingga berdampak pada kinerja penyerapan anggaran.

Belanja lainnya adalah belanja barang. Belanja barang merupakan komponen belanja pemerintah yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan operasional melalui pengadaan barang dan jasa non investasi. Realisasinya sangat bergantung pada ketepatan perencanaan kebutuhan, kelancaran proses pengadaan, serta kapasitas administratif lembaga (Nirwayadhi dan Dewi, 2025). Pinamangun *et al.* (2025) menemukan bahwa belanja barang meningkatkan penyerapan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional yang mendukung fungsi instansi. Suciati (2025) juga menunjukkan bahwa semakin besar proporsinya dalam struktur belanja, semakin tinggi tingkat realisasi, terutama pada instansi yang mengoptimalkan penyerapan secara proporsional berdasarkan target bulanan dan rencana kegiatan. Namun, Eprianto dan Pramukty (2025) mencatat bahwa prosedur pengadaan yang panjang dan hambatan administratif dapat menekan realisasi meski alokasi besar, yang sering kali memicu penumpukan belanja di akhir tahun. Hutaeruk *et al.* (2025) menambahkan bahwa perencanaan kebutuhan yang lemah dan perubahan spesifikasi pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) turut menurunkan tingkat penyerapan belanja barang.

Jenis belanja lain adalah belanja modal. Belanja modal merupakan komponen belanja pemerintah yang dialokasikan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberi manfaat jangka panjang. Dalam kerangka pengelolaan belanja publik, belanja ini diposisikan sebagai instrumen strategis karena meningkatkan kapasitas institusi dan kualitas layanan serta mendukung sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang (Wahyudi dan Nofianti, 2025). Mualim dan Meiyenti (2025) menemukan bahwa belanja modal memengaruhi penyerapan karena terkait langsung dengan pelaksanaan program strategis dan pembangunan infrastruktur institusional, seperti pada proyek strategis nasional. Haryati *et al.* (2025) juga menunjukkan bahwa kenaikan alokasi belanja modal diikuti peningkatan realisasi pada instansi yang memiliki kesiapan teknis, kualitas institusi, dan manajemen proyek yang memadai. Namun, Eprianto dan Pramukty (2025) mencatat bahwa belanja modal tidak selalu meningkatkan penyerapan akibat risiko keterlambatan tender, perubahan spesifikasi, dan kegagalan proyek. Chresty (2022) menambahkan bahwa kompleksitas administrasi dan lemahnya koordinasi antarunit dapat menekan realisasi meski alokasi relatif besar.

Berangkat dari temuan yang ada mengenai pengaruh belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara faktor belanja dan penyerapan anggaran belum menunjukkan pola yang konsisten. Penyerapan anggaran di BSN memiliki sifat kelembagaan tertentu sebagai lembaga pemerintah nonkementerian dengan fungsi standardisasi yang membutuhkan dukungan belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta investasi aset secara simultan. Sejauh ini, penelitian yang menganalisis pengaruh realisasi belanja terhadap penyerapan anggaran pada BSN masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap penyerapan anggaran di BSN selama periode 2010–2024.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap tingkat penyerapan anggaran di Badan Standardisasi Nasional. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Standardisasi Nasional, sedangkan objek penelitiannya data realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta pagu dan realisasi anggaran. Populasi mencakup seluruh data realisasi belanja dan penyerapan anggaran, dengan sampel berupa data tahunan periode 2010–2024 yang diambil menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran yang diukur sebagai rasio realisasi terhadap pagu anggaran dalam persentase. Variabel independen meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal berupa realisasi rupiah yang ditransformasikan ke Logaritma Natural untuk mengurangi perbedaan skala data dan mendukung pemenuhan asumsi regresi. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis dilakukan menggunakan model regresi linier berganda dengan pendekatan logaritma natural. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu dievaluasi melalui uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa estimasi yang dihasilkan bersifat tidak bias dan efisien.

Uji normalitas

Uji normalitas residual menggunakan uji Shapiro–Wilk menghasilkan nilai statistik W sebesar 0,92973 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2704. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka residu dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 1. Uji Normalitas

Shapiro-Wilk normality test	
W = 0.92973	p-value = 0.2704

Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026)

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch–Pagan menghasilkan nilai statistik BP sebesar 4,5055 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2118. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen, maka tidak terdapat bukti terjadinya heteroskedastisitas.

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

studentized Breusch-Pagan test		
BP = 4.5055	df = 3	p-value = 0.2118

Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026)



Uji multikoliniertias

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen yaitu sebesar 2,943 untuk belanja pegawai (InBelanjaPegawai), 2,721 untuk belanja barang (InBelanjaBarang), dan 2,220 untuk belanja modal (InBelanjaModal). Seluruh nilai berada di bawah 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model.

.Tabel 3. Uji Multikolinearitas

vif		
InBelanjaPegawai	InBelanjaBarang	InBelanjaModal
2.942697	2.720771	2.220176

Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026)

Uji autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin–Watson menghasilkan nilai DW sebesar 2,5739 dengan nilai probabilitas sebesar 0,394. Nilai berada di sekitar angka 2 dan tidak signifikan secara statistik, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model. Artinya, residual pada satu periode tidak berkorelasi dengan residual pada periode lain. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas, model regresi dinyatakan memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut terhadap pengaruh jenis belanja terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

lag	Autocorrelation	D-W Statistic	p-value
1	-0.3503148	2.573892	0.394

Alternative hypothesis: rho != 0

Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026)

Analisis regresi linier berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	0.847	0.912	0.381
Belanja Pegawai	0.070	4.354	0.001 **
Belanja Barang	-0.058	-1.241	0.240
Belanja Modal	-0.006	-0.839	0.420
F hitung	9.378		0.002
Adjusted R ²	0,642		

Sumber: Hasil R Studio V4.5.2 (2026)

Hasil pengujian secara berganda menggunakan uji F menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai F-hitung sebesar 9,378 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di BSN. Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,642 mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, model



masih mampu menjelaskan sekitar 64,2 persen tingkat penyerapan anggaran di BSN. Sisanya sebesar 35,8 persen disumbangkan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan pada tingkatnya 99% terhadap penyerapan anggaran di BSN, belanja barang dan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di BSN. Koefisien regresi belanja pegawai sebesar 0,070, artinya jika ada peningkatan belanja pegawai satu persen, maka tingkat penyerapan anggaran di BSN akan meningkat sebesar 0,070 persen atau sebaliknya dengan asumsi belanja barang dan belanja modal tidak berubah. Koefisien regresi belanja barang sebesar -0,058, artinya jika ada peningkatan belanja barang satu persen, maka tingkat penyerapan anggaran di BSN akan menurun sebesar 0,058 persen atau sebaliknya, dengan asumsi belanja pegawai dan belanja modal tidak berubah, sehingga arah dan besaran pengaruh tersebut tidak dapat disimpulkan secara pasti. Namun, hipotesis sementara dapat dikatakan bahwa belanja barang tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap penyerapan anggaran di BSN. Koefisien regresi belanja modal sebesar -0,006, artinya jika ada peningkatan belanja modal satu persen, maka tingkat penyerapan anggaran di BSN akan menurun sebesar 0,006 persen atau sebaliknya, dengan asumsi belanja pegawai dan belanja barang tidak berubah, sehingga secara statistik tidak terdapat bukti yang memadai mengenai arah maupun besaran pengaruh tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di BSN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai mendukung peningkatan tingkat penyerapan anggaran di BSN. Belanja pegawai memiliki karakteristik pembayaran yang relatif pasti karena terkait dengan kewajiban rutin, seperti gaji dan tunjangan. Selain itu, belanja pegawai tidak melalui proses tender maupun kontrak fisik sebagaimana belanja barang dan belanja modal. Karakteristik tersebut menyebabkan realisasi belanja pegawai cenderung lebih selaras dengan rencana penarikan dana sepanjang tahun anggaran (DJPb 2025). Data pelaksanaan anggaran yang dipublikasikan oleh unit-unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menunjukkan bahwa belanja pegawai sering kali memiliki persentase penyerapan tertinggi di berbagai wilayah kerja, sedangkan belanja modal cenderung memiliki persentase penyerapan terendah. Pola ini sejalan dengan logika institusional yang menyatakan bahwa semakin sederhana tahapan administratif dan proses pengadaan, semakin kecil kemungkinan terjadinya penundaan realisasi anggaran (DJPb 2024).

Terdapat setidaknya dua mekanisme yang dapat menjelaskan hubungan antara belanja pegawai dan tingkat penyerapan anggaran. Pertama, belanja pegawai dibayarkan secara berkala dan relatif pasti, sehingga realisasinya cenderung lebih merata sepanjang tahun anggaran. Pola pembayaran yang terdistribusi secara reguler ini berkontribusi pada stabilitas dan peningkatan tingkat penyerapan tahunan. Kedua, belanja pegawai tidak melalui tahapan pengadaan barang/jasa maupun proses verifikasi dokumen kontraktual yang lazim pada belanja barang dan belanja modal. Ketiadaan rantai prosedural tersebut mengurangi potensi hambatan administratif yang dapat menunda realisasi anggaran. Sejalan dengan hal ini, studi *World Bank* (2020) menunjukkan bahwa kerumitan prosedur pembayaran serta keterlambatan pengajuan tagihan oleh kontraktor merupakan faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan eksekusi belanja berbasis proyek

Meskipun besaran efek tersebut relatif kecil, namun pada satuan kerja dengan target penyerapan triwulanan yang ketat serta bobot penilaian tinggi pada indikator pelaksanaan



anggaran, perubahan dalam skala sepersekiian poin persentase dapat berdampak pada capaian skor kinerja, terutama jika terjadi secara berulang antartriwulan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Ayulia dan Isnowati (2025) yang menemukan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada instansi pemerintah karena sifatnya yang tidak tergantung pada proses pengadaan. Atiah *et al.* (2025) juga menemukan bahwa proses pengadaan dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa jenis belanja dengan prosedur yang lebih sederhana dan tingkat kesiapan pelaksanaan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penyerapan yang lebih baik.

Pengaruh Belanja Barang terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di BSN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja barang tidak mendukung peningkatan tingkat penyerapan anggaran di BSN. Dalam keuangan publik, belanja barang termasuk dalam fungsi alokasi pemerintah yang bertujuan menyediakan barang dan jasa publik melalui mekanisme pasar maupun kontraktual (Musgrave dan Musgrave, 1989). Namun, berbeda dengan belanja pegawai yang bersifat rutin, belanja barang sangat bergantung pada proses implementasi administratif, khususnya mekanisme pengadaan. Proses ini mencakup perencanaan teknis, pelelangan, kontraktualisasi, hingga mekanisme pembayaran berbasis progres pekerjaan. Ketergantungan pada tahapan prosedural tersebut menjadikan realisasi belanja barang tidak sepenuhnya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran.

Dalam pengelolaan anggaran publik, fenomena ini berkaitan dengan pola *slow-back loaded expenditure*, di mana belanja yang berbasis kontraktual cenderung terealisasi pada semester atau triwulan akhir tahun anggaran akibat keterlambatan proses administrasi dan tender (World Bank 2020). Ketika proses pengadaan dimulai pada pertengahan tahun, pembayaran baru dilakukan setelah progres fisik tercapai, sehingga realisasi keuangan tidak berjalan merata sejak awal tahun. Kemudian, peningkatan skala belanja barang juga dapat memperbesar beban verifikasi administratif, khususnya dalam pembayaran berbasis kontrak. Prosedur verifikasi yang rumit berpotensi memperlambat proses pencairan, sehingga memengaruhi tingkat penyerapan dalam periode pengamatan tertentu.

Pendekatan birokrasi Weberian menjelaskan bahwa organisasi publik beroperasi melalui prosedur formal yang ketat dan hierarkis. Dalam lingkup belanja barang, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan dapat memperpanjang waktu pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, besarnya alokasi belanja barang tidak otomatis meningkatkan penyerapan apabila proses administratif belum efisien. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wirawati, Fatimah, dan Sujadi (2023) yang menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Karena belanja barang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan, ketidaksignifikanan variabel tersebut menguatkan bahwa hambatan administratif dan tahapan teknis dapat mengurangi kontribusi belanja barang terhadap percepatan realisasi anggaran.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di BSN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak mendukung peningkatan tingkat penyerapan anggaran di BSN. Belanja modal dalam struktur APBN merupakan komponen pengeluaran yang ditujukan untuk pembentukan aset tetap dan peningkatan kapasitas pelayanan publik. Dalam kerangka keuangan publik, belanja modal memiliki karakter investasi jangka panjang yang output-nya tidak langsung terealisasi



dalam satu periode anggaran (Musgrave dan Musgrave, 1989). Berbeda dengan belanja operasional, realisasi belanja modal sangat bergantung pada kesiapan teknis proyek, kelengkapan dokumen perencanaan, proses pengadaan, serta progres fisik pekerjaan.

Belanja modal pada sektor publik memiliki siklus pelaksanaan yang lebih panjang dibandingkan jenis belanja lainnya karena melibatkan tahapan perencanaan teknis, pengadaan, pelaksanaan fisik, hingga proses serah terima pekerjaan. Ketika pelaksanaan belanja modal, pemerintah pusat mengidentifikasi adanya fenomena “*low and slow capital budget execution*” yaitu kecenderungan realisasi belanja modal yang rendah pada awal tahun dan meningkat signifikan menjelang akhir tahun anggaran. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi belanja modal nasional berada pada kisaran 82%, dengan hampir separuh realisasi terjadi pada triwulan IV dan proporsi yang besar pada bulan Desember. Pola ini mencerminkan konsentrasi realisasi di akhir tahun (*year-end concentration*), yang berpotensi menurunkan capaian penyerapan pada periode sebelumnya (World Bank 2020). Publikasi DJPb (2025) juga menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun anggaran, belanja modal sering menjadi komponen dengan tingkat serapan terendah. Faktor-faktor seperti pemblokiran anggaran, keterbatasan kesiapan dokumen teknis, serta keterlambatan proses kontraktual menjadi determinan penting dalam perlambatan tersebut.

Namun, hipotesis sementara dapat dikatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap penyerapan anggaran di BSN. Kesamaan arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal tidak serta-merta meningkatkan realisasi anggaran tahunan. Hal ini juga memperkuat argumentasi bahwa karakter belanja modal yang berbasis proyek dan kontraktual menyebabkan realisasinya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan tahapan implementasi.

Pengelolaan anggaran sektor publik tidak dapat dipisahkan antarjenis belanja karena realisasi anggaran merupakan hasil agregasi dari seluruh komponen belanja dalam APBN. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Ishak (2020) yang menemukan bahwa faktor-faktor pengelolaan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Cimahi. Meskipun variabel independen yang digunakan berbeda, kesamaan temuan pada pengujian simultan menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran merupakan hasil yang dipengaruhi oleh kombinasi berbagai komponen dalam sistem penganggaran, bukan oleh satu variabel tunggal. Hasil ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Khairiyah dan Oktari (2025) yang menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi anggaran. Walaupun penelitian tersebut menggunakan variabel dependen efisiensi anggaran, bukan penyerapan anggaran, keduanya berada dalam kerangka kinerja fiskal pemerintah. Kesamaan hasil simultan ini memperkuat argumentasi bahwa struktur belanja secara agregatif memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, meskipun secara parsial tidak seluruh variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan, secara kolektif ketiga jenis belanja tetap menjadi determinan penting dalam menjelaskan variasi tingkat penyerapan anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran di Badan Standardisasi Nasional (BSN) selama 2010 - 2024 lebih dipengaruhi oleh struktur belanja yang bersifat rutin, terjadwal, dan memiliki kepastian pencairan yang tinggi dibandingkan jenis belanja yang realisasinya bergantung pada



pengadaan, kesiapan teknis, dan tahapan kontraktual. Secara parsial, belanja pegawai menjadi faktor yang paling konsisten dalam menopang penyerapan anggaran, sedangkan belanja barang dan belanja modal belum berperan sebagai penentu utama karena pelaksanaannya lebih rentan tertunda oleh prosedur administratif, perubahan kebutuhan kegiatan, dan kesiapan pelaksanaan program. Namun demikian, secara simultan ketiga jenis belanja tetap berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, yang menegaskan bahwa kinerja penyerapan tidak dapat dipahami hanya dari satu komponen belanja, melainkan dari susunan belanja secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa pada lembaga pemerintah nonkementerian dengan karakter teknis dan administratif seperti BSN, kestabilan penyerapan anggaran tidak semata ditentukan oleh besarnya alokasi, tetapi oleh kombinasi struktur belanja dan tingkat kepastian eksekusi dari masing-masing jenis belanja. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan rumusan bahwa penyerapan anggaran pada lembaga sejenis cenderung ditopang oleh dominasi belanja rutin, tetapi tetap dipengaruhi oleh konfigurasi belanja secara menyeluruh, sementara optimalisasi belanja barang dan belanja modal sangat ditentukan oleh mutu perencanaan dan kesiapan pelaksanaan program. Namun, penelitian ini masih terbatas karena hanya mencakup satu instansi, data *time series* yang pendek, menggunakan data tahunan, dan memusatkan analisis pada tiga jenis belanja, sehingga belum sepenuhnya menangkap pengaruh faktor lain seperti kualitas perencanaan, revisi anggaran, tata kelola pengadaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perubahan kebijakan fiskal yang juga dapat memengaruhi pola penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil tersebut, BSN perlu memperkuat perencanaan dan kesiapan pelaksanaan, terutama pada belanja barang dan belanja modal, melalui penajaman kebutuhan, percepatan kelengkapan dokumen, penjadwalan pengadaan sejak awal tahun, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala agar penyerapan anggaran tidak terlalu bergantung pada belanja pegawai. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan objek, menambah variabel kelembagaan dan manajerial, serta menggunakan data bulanan atau triwulanan agar pola penyerapan anggaran di sektor publik Indonesia dapat dijelaskan secara lebih rinci dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, T., Maria, M., & Sari, Y. (2022). Determinan Penyerapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 32, 3387. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p14>

Atiah, N. U. R., Zulfanetti, & Mustika, C. (2025). Determinants of Budget Absorption in Regional Work Units in Jambi City. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 6(1), 39–57. <https://doi.org/10.22437/jar.v6i1.48940>

Ayulia, S. D., & Isnowati, S. (2025). Peran Belanja Pemerintah, Akurasi Perencanaan Kas dan Pengelolaan Uang Persediaan Dalam Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(2).

Badan Standardisasi Nasional. (2022). *Rencana strategis Badan Standardisasi Nasional 2020–2024*.



Cahyaningtyas, A., & Gunawan, J. (2023). Pengaruh Proporsi Belanja Barang dan Jasa, Revisi Anggaran, dan Lokasi Satuan Kerja terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(5). <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i5.463>

Chresty, A. (2022). *Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Makassar II tahun 2018–2020* [Tugas akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN].

Darmayanti, A. (2024). Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review*, 9(3), 247–256. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i3.533>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Publikasi Unit Kerja Terkait IKPA dan Perhitungan Penyerapan Berbasis Target Per Jenis Belanja (mengacu PER-5/PB/2024)*.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). *Publikasi Unit Kerja Tentang Dinamika Penyerapan dan Belanja Modal Yang Tertinggal, Serta Dampak Kebijakan Efisiensi/Pemblokiran Pada Belanja Modal*.

Dyna, D. R. (2023). *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan* [Tesis, Politeknik Negeri Sriwijaya].

Eprianto, I., & Pramukty, R. (2025). Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia: Review literatur dan rekomendasi. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1).

Fitri, F., Ikrawati, I., Hasdi, W., S, M. I., & Nurfadilah, N. (2026). Pengaruh Belanja Modal dan Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi NTB Dimoderasi Realisasi Anggaran. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 12(1), 801–810.

Fitriani, L., & Mulyandani, V. C. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada BPKAD Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1).

Hadisutisna, S. (2025). Menakar Akuntabilitas Fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Analisis Dokumen Realisasi Anggaran Tahun 2021–2023. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 16(1).

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Harris, J. (2025). *Contemporary Issues and Challenges in Public Finance in an Age of Uncertainty*. Palgrave Macmillan.

Haryati, D. C., Nurpiji, N., & Masitoh, G. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia: Pendekatan data panel. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(1).

Hutauruk, G., Wira, W., & Paramita, B. (2025). *Analisis Perencanaan, Pelaksanaan dan Kualitas Hasil terhadap Penyerapan Anggaran Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kinerja APBN 2023 Kuat dan Sehat*.



Khairiyah, N. A., & Oktari, V. (2025). Pengaruh Belanja Pegawai, Barang, Jasa, dan Modal terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 37242–37255.

Khotimah, S. H., & Mulyanti, K. (2025). Pengaruh Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja DJKN periode 2023. *Land Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i2.4249>

Kuntadi, C., & Nugroho, D. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Partisipasi Anggaran. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 4(3), 332–337.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Montfaucon, A. F. L., Arya, A., Purnomo, H., Ismail, T. M., Permana, B., Kusdarti, N., Pearson, A., Tripathi, S. C., Gabriel, J., Ilman, A. S., & Kanani, A. (2021). *Indonesia: Revenue and Budget Management: Institutional Diagnostic of Low and Slow Central Government Capital Budget Execution*. World Bank Group.

Mualim, W. M. A., & Meiyenti, I. (2025). Investasi Modal Publik dan Pertumbuhan Daerah: Implikasi Fiskal dari Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia (2020–2024). *Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 12(1).

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Book Company.

Ngongo, A. H., & Rahyuda, H. (2024). Determinants of Budget Absorption in Regional Apparatus Throughout East Nusa Tenggara. *International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, 2(12), 4104–4125.

Nirwayadhi, P. I., & Dewi, N. A. W. T. (2025). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pengadaan Barang Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 15(1).

OECD. (2021a). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*. OECD Publishing.

OECD. (2021b). *Public Governance and Public Sector Efficiency*. OECD Publishing.

Pinamangun, J., Wenas, J. G., & Turangan, J. L. R. (2025). Analisis Penerapan Efisiensi Anggaran Belanja Sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).

Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.

Suciati, S. H. (2025). Efisiensi Anggaran dan Kinerja Satker: Tinjauan nilai IKPA BBPOM Makassar dalam menindaklanjuti Inpres No. 1 Tahun 2025. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1).

Suryono, A. (2020). Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 Dalam Penataan Organisasi dan Tata Laksana. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1).



Wahyudi, T., & Nofianti, N. (2025). Belanja Modal dan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Indonesia: Sebuah kajian sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 4(1).

Wirawati, A., Fatimah, S., & Sujadi. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020–2022. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 20–30. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v5i2.83>

World Bank. (2020a). *Indonesia Public Expenditure Review*. World Bank Group.

World Bank. (2020b). *Indonesia: Revenue and Budget Management: Institutional Diagnostic of Low and Slow Central Government Capital Budget Execution* (Report No. AUS0001636). World Bank Group.

World Bank. (2025). *World Development Indicators 2025*. World Bank Group.

